

KONTRIBUSI DANA DESA DALAM MENURUNKAN ANGKA KEMISKINAN DI KABUPATEN KULON PROGO

Nada Nabila¹, Rohmad Yuliantoro²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

Email : nada1500012061@webmail.uad.ac.id

ABSTRACT

Poverty is a problem that is generally encountered in almost all developing countries, especially the densely populated countries such as Indonesia. Poverty occurs due to the difference in resources or economic disparities against community groups as well as the low level of human development indicators. This happens also in Kulon Progo Regency, a Regency that has a percentage of the poverty levels are quite high in some districts and some notes, data showed in 2018 poverty in Kulon Progo of 51,622 (inhabitants) population is made up of 12 districts and 88 villages. This research aims to know the influence of the development of the village the village Fund, and empowerment of village community against the miskin population in Kulon Progo Regency.

This research was qualitative in nature using secondary data obtained from the Office of community empowerment and the village Population Control and family planning Kulon Progo Regency which consists of 88 villages and cross section data is a data consists of one or more variables that are collected at the same time. The independent variable in this study was the development of village Shopping Village, and shopping village on the empowerment of village community, while the dependent variable is the poor population. The analysis was done using SPSS tools.

The results of this study indicate that; 1) village Fund for construction of the village to a poor population decline. 2) village Fund for community empowerment to poor residents of the village. Because its the village Fund provided by the Central Government through the local Government used optimally and right on target in accordance with the programs that are run either by the establishment of the area or village.

Keywords: *The village Fund, the construction of the village, community empowerment, and residents of the poor.*

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah lama yang pada umumnya dihadapi hampir di semua negara - negara berkembang, terutama negara yang padat penduduknya seperti Indonesia. Kemiskinan juga merupakan suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Kemiskinan terjadi karena adanya perbedaan sumber daya serta rendahnya indikator indikator pembangunan manusia, selain itu juga ketimpangan pembangunan yang tidak merata sehingga berdampak pada tingginya kemiskinan di Indonesia. Terkait dengan masalah kemiskinan, menurut data BPS jumlah penduduk miskin pada tahun 2018 penduduk kota dengan kemiskinan sebesar 6.89% sedangkan kemiskinan di pedesaan sebesar 13.10%. Masalah kemiskinan ini harus segera ditindak lanjuti, maka baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mendorong ketersediaan informasi dan sumber daya yang berguna bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Menanggapi permasalahan tersebut, strategi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yaitu dengan melaksanakan pembangunan nasional yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa. Dalam pembangunan desa pemerintahan desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas, dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa. Beberapa hal yang menyebabkan desa membutuhkan sumber pendapatan yaitu:

- 1) Desa memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang kecil dan sumber pendapatannya sangat bergantung pada bantuan yang sangat kecil pula.
- 2) Kesejahteraan masyarakat desa yang rendah sehingga sulit bagi desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tinggi.

- 3) Masalah itu diikuti dengan rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan publik.
- 4) Banyak program pembangunan masuk ke desa akan tetapi hanya dikelola oleh Dinas.

Program pembangunan desa yang bersifat *bottom-up* tertuang dalam undang-undang Otonomi Daerah (OTDA). Landasan pijak OTDA ini, merujuk pada Undang-undang Otonomi Daerah nomor 22 tahun 1999 dan UU Nomor 25 tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Salah satu strategi pemerintah dalam hal memberi dukungan keuangan desa dan membantu agar desa menjadi mandiri adalah berasal dari dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah minimal 10% yang diperuntukkan untuk desa disebut Alokasi Dana Desa (ADD). Maksud pemberian ADD sebenarnya adalah sebagai bantuan stimulan untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa yang disalurkan oleh pemerintah kepada Pemerintah Desa bertujuan agar pemerintahan desa dapat meningkatkan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, maka desa mempunyai hak untuk memperoleh bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten, dimana Dana Desa tersebut dialokasikan oleh Pemerintah Pusat untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa yang berdasarkan kewenangan dan kebutuhan Desa sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai Desa (UU No. 6 Tahun 2014). Melalui dana desa, desa ataupun kelurahan berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa secara otonom.

Dana desa yang disalurkan oleh pemerintah daerah melalui anggran belanja daerah kepada desa. Belanja desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa

yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dalam Setianingsih (2016).

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam menerapkan program dana desa menjadi tantangan tersendiri dalam memaksimalkannya, sehingga diharapkan dapat menekan angka kemiskinan. Akan tetapi, pemanfaatan dana desa yang masih belum tepat sasaran masih saja terjadi di pemerintahan desa dikarenakan adanya beberapa faktor seperti desa belum siap mengelola dana tersebut dan tata kelola yang masih lemah, kurangnya sumber daya manusia, atau pemerintah desa yang tidak transparan dan akuntabel. Permasalahan kemiskinan yang terjadi di kabupaten Kulon Progo yaitu masih terdapat tingginya angka kemiskinan jika dibandingkan dengan kabupaten lain yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana desa pada pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kulon Progo.

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Teori Kemiskinan

Teori kemiskinan menurut Wiguna & Rachmad, (2013) dapat dijelaskan merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya, seperti tidak dapat memenuhi kesehatan, standar hidup layak, kebebasan, harga diri, dan rasa dihormati orang lain serta suramnya masa depan bangsa dan negara.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik, kemiskinan diukur berdasarkan besarnya rupiah yang dibelanjakan perkapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan dengan penetapan perhitungan yaitu masyarakat yang berpenghasilan dibawah Rp 7-057 per orang per hari atau dengan 2.100 kilokalori perkapita perhari (BPS.go.id: 2010). Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Kriteria statistic dalam BPS tersebut adalah:

1. Tidak Miskin, adalah mereka yang pengeluaran per orang per bulan lebih dari Rp 350.610.
2. Hampir Tidak Miskin, dengan pengeluaran per bulan per kepala antara Rp 280.488 s/d. – Rp 350.610,- atau sekirtar aantara Rp 9.350 s/d. Rp 11.687 per orang per hari. Jumlahnya mencapai 27,12 juta jiwa.
3. Hampir Miskin, dengan pengeluaran per bulan per kepala antara Rp 233.740 s/d. Rp 280.488.- atau sekitar antara Rp 7.780.- s/d Rp 9.350.- per orang per hari. Jumlahnya mencapai 30,02 juta.
4. Miskin, dengan pengeluaran per orang perbulan per kepala Rp 233.740.- kebawah atau sekitar Rp 7.780.- kebawah per orang per hari. Jumlahnya mencapai 31 juta.

5. Sangat Miskin, (kronis) tidak ada kriteria berapa pengeluaran per orang per hari. Tidak diketahui dengan pasti berapa jumlah pastinya. Namun, diperkirakan mencapai sekitar 15 juta .

Teori Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/Kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). Pengelolaan ADD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 20, adalah Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Tujuan adanya ADD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, adalah:

- 1) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- 2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
- 4) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
- 5) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- 6) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- 7) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- 8) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Teori Dana Desa

Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Ketentuan yang mengatur Dana Desa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai pelaksanaan dari ketentuan *Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2)* dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Pemerintahan Desa

Keberadaan desa telah dikenal lama dalam tatanan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Definisi desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI Syafrudin dan Na'a, (2010:3).

Pemerintah Desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemimpin pemerintah desa, seperti tertuang dalam pasal 1 bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pembangunan Desa

Wujud pembangunan desa adalah adanya berbagai program dan proyek pembangunan yang bertujuan menciptakan kemajuan desa. Program dan proyek itu tidak hanya untuk mencapai kemajuan fisik saja, tetapi juga meningkatkan

kemampuan masyarakat. Sasaran pembangunan desa meliputi perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat desa, penerahan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa serta penumbuhan kemampuan untuk berkembang secara mandiri yang mengandung makna kemampuan masyarakat (empowerment) untuk dapat mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi serta dapat menyusun perencanaan untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Menurut Setianingsih (2016) menunjukkan adanya pengaruh Dana Desa di bidang pembangunan desa terhadap penduduk miskin. Artinya penggunaan Dana Desa yang tepat sasaran dan sesuai dengan aturan perundang – undangan dapat menurunkan kemiskinan terhadap suatu desa. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :

H1 : Dana desa untuk pembangunan desa berpengaruh terhadap penduduk miskin.

Pemberdayaan Masyarakat

Secara umum pemberdayaan dalam pembangunan meliputi proses pemberian kekuasaan untuk meningkatkan posisi sosial, ekonomi, budaya dan politik dari masyarakat yang bersifat lokal, sehingga masyarakat mampu memainkan peranan yang signifikan dalam pembangunan.

Sumodiningrat (1997:165) dalam Setianingsih (2016) menyatakan, bahwa pemberdayaan masyarakat bertalian erat dengan upaya penanggulangan masalah-masalah pembangunan, seperti pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan. Pemberdayaan masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan ialah dengan memberdayakan masyarakat desa dalam peningkatan perekonomian atau dalam program-program yang dijalankan baik oleh aparat desa ataupun pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Setianingsih (2016) menunjukkan adanya pengaruh Dana Desa di bidang pemberdayaan masyarakat desa terhadap penduduk miskin. Artinya pemanfaatan Dana Desa dalam

pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan sehingga dapat menurunkan kemiskinan terhadap suatu desa. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :

H2 : dana desa untuk pemberdayaan kemasyarakatan desa berpengaruh terhadap penduduk miskin.

METODE PENELITIAN

Populasi yang menjadi objek penelitian ini adalah Dana Desa se-Kabupaten Kulon Progo. Sampel dalam penelitian ini adalah desa-desa di Kabupaten Kulon Progo yang terdiri dari 88 desa di 12 Kecamatan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *purposive sampling*. Berdasarkan metode tersebut, maka kriteria penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Desa-desa di Kabupaten Kulon Progo yang sudah mengumpulkan APBDes pada tahun 2017.
- 2) Desa-desa yang mengalokasikan anggaran untuk Bidang pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa.

Kemudian dalam teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Instansi yang terkait untuk mendapatkan data penelitian adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kulon Progo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	72

Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	273,95177544
Most Extreme Differences	Absolute	,083
	Positive	,083
	Negative	-,054
Kolmogorov-Smirnov Z		,704
Asymp. Sig. (2-tailed)		,705

a. Sumber: Data sekunder, diolah (2019)

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa hasil uji *One Kolmogorof – Smirnov*. Nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar $0,705 > 0,05$ (*alpha*) maka data berdistribusi normal. sedangkan nilai Kolmogorov- Smirnov Z sebesar 1,024.

Uji Multikolinearitas

Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Dana Pembangunan Desa	0,955	1,047	Bebas Multikolinearitas
Dana Pemberdayaan Masyarakat	0,955	1,047	Bebas Multikolinearitas

Sumber: Data sekunder, diolah (2019)

Berdasarkan tabel 4.4 hasil uji multikoleniaritas diatas dapat dilihat nilai *tolerance* dari kedua variabel ≥ 0.10 dengan nilai $VIF \leq 10$ sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terdapat multikolineritas.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	T	Sig	Keterangan
Dana Pembangunan Desa	1,581	0,118	Bebas Heteroskedastisitas
Dana Pemberdayaan Masyarakat	0,462	0,645	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber: Data sekunder, diolah (2019)

Berdasarkan tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa nilai sig. untuk variabel dana pembangunan desa sebesar 0,118 dan nilai sig. untuk variabel dana pemberdayaan masyarakat sebesar 0,645. Dilihat dari nilai signifikansi kedua variabel lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.

Regresi Linier Berganda

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Variabel	Koefisien
1.	(Constant)	-987,839
	Dana Pembangunan Desa	2,144E-06
	Dana Pemberdayaan Masyarakat	2,326E-06

Sumber: Data sekunder, diolah (2019)

Hasil uji regresi berganda dengan persamaan $Y = (-987,839) - (2,144E-006 + 2,326E-006) + e$.

1. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate

1	,743 ^a	,552	,539	277,894
---	-------------------	------	------	---------

Sumber: Data sekunder, diolah (2019)

Berdasarkan tabel 4.6 nilai R^2 dalam analisis regresi linear berganda diperoleh angka koefisien determinasi dengan adjusted R^2 sebesar 0,539. Hal ini berarti bahwa 5,39% variasi penduduk miskin dapat dijelaskan oleh dana desa pada pembangunan desa, dan dana desa pada pemberdayaan masyarakat desa, sedangkan sisanya 94,61 dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang diteliti.

2. Uji F

Hasil Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	6553658,101	2	3276829,050	42,432	,000 ^b
1 Residual	5328519,844	69	77224,925		
Total	11882177,944	71			

- Dependent Variable: TOTAL_Y
- Predictors: (Constant), TOTAL_X2, TOTAL_X1
- Sumber: Data sekunder, diolah (2019)

Berdasarkan uji ANNOVA pada tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi $< 0,05$ atau nilai sig. sebesar $0,000 < 0,05$ atau lebih kecil dari nilai alpha, maka dapat disimpulkan variabel dana desa untuk pembangunan desa dan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat desa berpengaruh secara simultan terhadap penurunan penduduk miskin.

3. Uji T

Hasil Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-987,839	192,360		-5,135	,000
Dana Desa untuk Pembangunan Desa	2,144E-006	,000	,713	8,639	,000
Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa	2,326E-006	,000	,410	4,964	,000

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dana desa untuk pembangunan desa memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi $< 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 yang menyatakan dana desa untuk pembangunan desa berpengaruh terhadap penurunan penduduk miskin terdukung. Dana desa untuk pemberdayaan masyarakat desa memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi $< 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 yang menyatakan dana desa untuk pemberdayaan desa berpengaruh terhadap penurunan penduduk miskin terdukung.

Hasil dan Pembahasan

Pengaruh Dana Desa di Bidang Pembangunan Desa Terhadap Penduduk Miskin.

Hasil uji hipotesis pertama dapat disimpulkan bahwa Dana Desa di bidang pembangunan desa berpengaruh terhadap penduduk miskin. Hasil ini dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama terdukung.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Setianingsih (2016) menunjukkan adanya pengaruh Dana Desa di bidang pembangunan desa terhadap penduduk miskin. Artinya penggunaan Dana Desa yang tepat sasaran dan sesuai dengan aturan perundang – undangan dapat menurunkan kemiskinan terhadap suatu desa seperti, dapat meningkatkan infraksruktur perdesaan, membangun kemandirian desa dan membangun perkembangan status desa dari yang tertinggal menjadi yang berkembang.

Pengaruh Dana Desa di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Terhadap Penduduk Miskin

Hasil uji hipotesis kedua dapat disimpulkan bahwa Dana Desa di bidang pemberdayaan masyarakat desa berpengaruh terhadap penduduk miskin. Hasil ini

dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua terdukung.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Setianingsih (2016) menunjukkan adanya pengaruh Dana Desa di bidang pemberdayaan masyarakat desa terhadap penduduk miskin. Artinya pemanfaatan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup, mendorong peningkatan keswadayaan gotong-royong masyarakat, meningkatkan pendapatan desa & masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan kesejahteraan sehingga dapat menurunkan kemiskinan terhadap suatu desa.

Penutup

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Desa di bidang pembangunan dan Dana Desa di bidang pemberdayaan masyarakat desa terhadap penurunan angka penduduk miskin. Berdasarkan hasil analisa terhadap 88 sampel desa di 12 kecamatan di Kabupaten Kulon Progo yaitu Dana Desa di bidang pembangunan desa, Dana Desa di bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan data penduduk miskin yang telah dikumpulkan serta telah dilakukan pengujian. Berdasarkan hasil pengujian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Dana desa untuk Pembangunan Desa berpengaruh terhadap Penurunan Penduduk Miskin.
2. Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa berpengaruh terhadap Penurunan Penduduk Miskin.

Keterbatasan

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain, yaitu:

1. Data yang dapat diakses dalam penelitian hanya 72 laporan dari 88 desa.
2. Untuk peneliti selanjutnya dengan penelitian dan tujuan yang sama yaitu untuk melihat multiplier effect diharapkan agar menambah variabel dan time series

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang telah dijelaskan sebelumnya, guna meningkatkan kualitas penelitian selanjutnya. Adapun saran-saran diantaranya:

1. Penelitian selanjutnya bisa dilakukan di kabupaten lain seperti kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Sleman, dan lain-lain
2. Penelitian selanjutnya diharapkan agar menambah tahun (*time series*) dan menambah data yang memfokuskan dalam menurunkan penduduk miskin, seperti pendapatan asli desa, dan bantuan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwardi & Sukanto. (2014). Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 12 (1), 29-41
- Badan Pusat Statistik, 05 Januari 018. Data Kemiskinan Tahun 2014-2017 Kabupaten Kulon Progo. <https://kulonprogokab.bps.go.id>. Diakses tanggal 23 Februari 2019
- Badrudin, R. (2012). *Ekonomi Otonomi Daerah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Ghiyads, S. (2018). Pendapatan Asli Daerah (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR), dan Belanja Bidang Pendidikan. *Jurnal Akuntansi*
- Ghozali, I. (2016). *Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23* (Edisi 8), Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haughton, J., & Khandker. R. (2012). *Pedoman Tentang Kemiskinan dan Ketimpangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Idris, A. (2016). *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardikanto, T., dan Poerwoko, S. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Edisi Revisi), Bandung : Alfabeta.
- Pemerintah Indonesia (2004). *Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2004 tentang Alokasi Dana Desa*. Jakarta, Indonesia
- Pemerintah Indonesia (2004). *Undang – Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Kemiskinan*. Jakarta, Indonesia

- Pemerintah Indonesia (2007). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta, Indonesia
- Pemerintah Indonesia (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2008 tentang Belanja Modal*. Jakarta, Indonesia
- Pemerintah Indonesia (2014). *Peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa*. Jakarta, Indonesia
- Pemerintah Indonesia (2014). *Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta, Indonesia
- Pemerintah Indonesia. (2014). *Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta, Indonesia
- Prasetyanto, P., & Eko. (2012). *Dampak alokasi dana desa pada era desentralisasi fiskal terhadap perekonomian daerah di indonesia (Disertasi)*, Bogor: IPB
- Setianingsih, I. (2016). *Kontribusi Dana Desa Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan di Kabupaten Melawi*. *Jurnal Ilmu Ekonomi*.
- Soemantri, B. T. (2011). *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Sumaryadi, I. N. (2005) *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.
- Supriyatna, T. (2000). *Birokrasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan*. Bandung: Humaniora.

- Susilowati, N., Dwi, S., & Hadi, S. (2017). Pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Belanja Modal, dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(4), 514-526
- Syafrudin, A., & Suprin, N. (2010). Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Moderen Dalam Desain Otonomi Desa. Bandung : PT. Alumni
- Widianto, dkk. (2014). Pengaruh Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Wiguna, R. (2013). Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-201p. *Ekonomi Pembangunan*.